



Politik Identitas Itu yang Terakhir

KH. DR. SAID AQIL SIRADJ,

Katib Syuriah PB NU dan Pengajar pada Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta.

Sejak terbukanya kemungkinan lahirnya partai-partai baru, ada indikasi kecenderungan politik praktis di kalangan aktivis NU sudah mengalahkan kecenderungan kulturalnya. Akibatnya, kegiatan sosial dan keagamaannya melemah. Bagaimana pendapat Anda?

Saya belum bisa menyimpulkan seperti yang Anda katakan. Karena semarak berpolitik pra-pemilu kemarin memang wajar karena selama Orde Baru kita ini tertindas, ditindas. Maka begitu ada sedikit kebebasan untuk berpolitik di kalangan kita ada rasa euforia politik, itu wajar-wajar saja.

Bagaimana dengan banyaknya aktivis dan pengurus NU yang juga di partai sehingga mengganggu aktivitas mereka di NU?

Memang masalahnya hubungan NU dengan partai politik kan belum jelas. Maka menjelang Muktamar ini kita mengadakan seminar-seminar antara lain dengan tema NU pasca pemilu, Khittah NU dan *strategic planning*, sehingga nanti akan mendapatkan kejelasan hubungan NU dan PKB. Kalau hubungannya sudah jelas baru nanti pilihannya akan jelas apakah seorang aktivis NU aktif di NU atau di PKB. Selain itu saya kira penting untuk kita bahas dalam Muktamar posisi NU sebagai kontrol terhadap orang NU yang terjun ke politik

praktis, dan juga mengontrol roda pemerintahan. Siapa saja yang duduk di pemerintahan, kalau salah kita katakan salah yang baik kita dukung. NU akan tetap sebagai kekuatan moral. Siapapun yang benar kita dukung yang keliru kita ingatkan, otoriter kita lawan, zalim kita *habisin*.

Apakah aturan yang normatif seperti itu bisa terjadi dalam praktek politik mengingat pengalaman sebuah organisasi Islam lain pada orde yang lalu menjadi sangat terkooptasi?

Menurut saya bisa. Sebab jika kita perbandingkan dengan orde yang lalu, yang akan datang sistemnya lebih demokratis. Sistem Orde Baru kemarin memang benar-benar salah, merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Maka orang yang masuk ke dalamnya akan terseret arus yang tidak demokratis itu. Yang kita harapkan di masa datang prinsip-prinsip nilai demokrasi dijunjung tinggi, soal dalam tataran prakteknya ada yang keliru tidak akan semassif seperti masa lalu dan itu manusiawi. Selain itu, NU punya modal besar untuk melakukan kontrol moral itu. Lihatlah, kalah atau menang, berkuasa atau tak berkuasa NU selalu menjadi alternatif, selalu diperhitungkan, bahkan kalau ada

fihak yang sedang konflik mereka selalu percaya kepada NU. NU selalu menjadi semacam rujukan moral karena NU seperti kita tahu memiliki landasan *tawazun*, *tawasuth*, *i'tidal* dan *tasamuh* yang merupakan nilai dasar. Itu semua prinsip, bukan pelengkap, bukan *mujamalah*, basa-basi tetapi merupakan *mabaadi'* 'ammah nilai-nilai universal yang tidak bisa diganggu gugat. Yaitu tetap *tawazun* dalam berfikir dalam menyelesaikan segala hal, moderat, *tawasuth*, *balance*, netral dalam bertindak dan bermasyarakat, berdakwah, berislam baik aqidah maupun amaliah, ibadah serta akhlak. Kemudian *i'tidal*, *istiqamah*, konsisten memperjuangkan kebenaran dan *maslahah* 'ammah, meskipun dalam amar ma'ruf nahi munkar tetap disertai nilai-nilai tadi supaya tidak ekstrim namun tetap *i'tidal*, lurus. Dan *tasamuh*, kita ingin membangun Islam yang toleran, Islam yang tidak tertutup, Islam yang menghargai kelompok lain, agama lain. Dengan demikian prinsip-prinsip ini merupakan kekuatan bagi warga nahdliyin sekaligus jam'iyah NU itu sendiri. Kekuatan ini akan menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Kalau tidak ada NU, Indonesia entah Islamnya seperti apa, bisa Islam keras semua. Karena selain NU itu Islamnya keras semua, Islam yang formal. Di Indonesia, jika penampilan Islam hanya politik Islam saja, Islam bisa hancur, sebab yang aktif menyuarakan politik Islam, politik identitas itu pemahaman Islamnya tidak mendasar, moralnya belum sesuai betul dengan Islam. Jadi seperti masih ada pemisahan, yang memahami sumber-sumber Islam, literatur Islam tidak ada semangat untuk menampilkan politik Is-

lam dan yang bicara politik Islam tidak mampu menggali sumber dari *maraji'*nya. Jadi yang menjadi benteng Islam yang sebenarnya, Islam yang *syumul*, komprehensif adalah NU. Kita selalu ingin membangun peradaban yang berwarna Islam tanpa terjadi benturan-benturan dengan nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang ada dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Kalau di sini Islam kayak di Arab *enggak* bisa, politik Islam di sini *enggak* jalan. Misalnya kalau orang *enggak* bergabung dengan partai Islam lalu dihujat *enggak* Islam itu bahaya sekali. Alhamdulillah NU memberikan alternatif pada masyarakat, katakanlah partai boleh di mana saja asalkan masih memegang teguh tauhid Islam. Menurut NU semua orang Islam ya Islam baik yang abangan, yang apa saja, semua orang Islam.

Landasan telogis yang paling mendasari pilihan itu?

Bahwa Islam itu, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an; *wa man absanu qaulan min man da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala inna ni min al-muslimin*. Pertama kali, penyampaian, tutur kata yang baik, dialog yang baik, baru *wa 'amila shalihan*, merealisasikan perkataan, mewujudkan dialog yang baik itu menjadi amal yang shaleh, amal yang bermanfaat, sehingga semua apa yang kita lakukan itu dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Ingat, *fahya'budu rabba badza al-bait alladzi ath'amahum min ju'in wa amanahum min khauf*. Ayat tadi, setelah bicara soal *ibadah mahdlah*, bicara soal kesejahteraan ekonomi dan perlindungan dari segala ancaman. Itu bagian dari perlindungan HAM. Jadi amal shaleh itu

amal yang nilai ibadahnya tidak ditinggalkan, nilai vertikalnya selalu ada, tapi pada tataran sosialnya ia memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dari idealisme ketuhanan, ini bedanya dengan kaum sekular. Kemudian kalau kita mampu menyampaikan tutur kata yang baik dan mampu mengkongkritkan, merealisasikan amal shaleh ke dalam kehidupan sehari-hari, baru katakan dengan tegas kami orang Islam. Orang muslim jangan bilang Islam dulu, sementara ucapan dan perilakunya belum mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Kalau mengaku Islam tunjukkan *aqwal, ahwal, a'mal* yang baik setelah itu boleh katakan bahwa saya orang Islam. Politik indentitas itu yang terakhir. Berangkat dari situ maka sudah barang tentu agar *aqwal, ahwal, a'mal* bisa diterima dan bermanfaat bagi orang banyak dalam konteks negara kita yang plural itu maka prinsip *tawazun, tawasuth, tasamuh* harus kita terapkan. Bisa dibayangkan dalam surat al-Rahman kata-kata *mizan, wazn, qisht*, itu disebut berkali-kali, mengingatkan kita agar jangan lupa sikap moderat itu yang *balance*, tidak *tafrid* dan tidak *ifrad* tidak liberal tetapi tidak tertutup. Ayat tentang itu dalam al-Qur'an itu banyak.

Dalam pelaksanaannya kadang-kadang tampak sebagai inkonsistensi.

Baik. Yang namanya tengah itu kan sulit, samar, tidak jelas. Katakanlah madzhab empat, itu kan jalan tengah semua, tidak liberal seperti Mu'tazilah, dan tidak tekstual kaya Khawarij. Tapi di antara madzhab empat itu yang semuanya mengambil jalan

tengah itu memang relatif. Ada yang bagaimanapun tengah tapi dekat dengan Mu'tazilah, Imam Hanafi misalkan yang mementingkan *qiyas* dari pada *ijma'* dan Hadis ahad. Ada yang memang tengah tapi miring ke tekstual, agak tertutup misalnya madzhab Hambali. Dalam madzhab Asy'ari sendiri, ulama-ulama *Ayya'ir*, ada yang liberal seperti Fakhrrurazi, Imam Haramain, yang dekat dengan kaum rasional, argumentasinya selalu rasional. Ada juga yang dekat dengan nash al-Qur'an dan Hadis, seperti Asy'ari sendiri, al-Baqillani itu semua merupakan variasi dari *tawasuth*. Jadi *tawasuth* itu tidak satu. Metode atau *manhaj* Ahlussunnah itu ya tengahnya itu.

Nilai-nilai tawasuth, tawazun dan sebagainya itu apakah sudah menjadi kesadaran umum di kalangan kaum nahdliyyin khususnya kiai-kianya?

Secara amaliah semuanya sudah. Bahwa kiai-kiai dan ummatnya itu 99% sudah menjalankan prinsip-prinsip tadi. Secara teoritis, filosofi memang cara menyampaikannya berbeda-beda ada yang ilmiah, ada yang berbobot, ada yang masih ngacak omongnya. Tidak ada kiai yang ekstrim, kalau ada itu hanya satu dua kiai yang memang pola pikirnya sudah ekstrim tertutup dan lain sebagainya.

Dalam sejarah NU kecenderungan politik identitas itu juga besar.

Iya. Tapi bagaimanapun saya bisa mengatakan orang-orang yang ada di partai yang dasarnya Islam asal itu orang NU tidak seekstrim yang non NU. Contohnya saja orang NU yang ada di PPP yang dasarnya

Islam pasti penampilannya berbeda. Ada tipe-tipe dan karakter tersendiri yang berbeda dengan orang PPP yang non NU. Kalau orang NU bagaimanapun juga sikapnya pasti simpatik, tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah merasa dirinya paling benar. Itu sudah *tarbiyah nahdliyyah*, sehingga terbentuknya ya karakter seperti itu. Bisa kita lihat hal lain yang khas NU ada budaya orang NU yang tidak suka menonjolkan dirinya dalam koteks jadi pemimpin. Kecuali kalau dipilih dia mau jika sesuai dengan prinsip. Atau katakanlah sebenarnya dia mau tapi dia tidak terlalu berambisi untuk itu. Contoh lain misalnya kalau shalat berjamaah, kalau orang NU selalu tidak ingin jadi imam, selalu mendorong yang lain. Contoh lagi, dalam rapat pleno atau kalau sedang berkumpul dengan kiai-kiai yang namanya dorong-dorongan menunjuk temannya jadi ketua sudah biasa, sedangkan dia sendiri merendah.

Landasan teologis NU Ablussunnah waljama'ah begitu penting bagi kaum nahdliyyin. Maka untuk menghadapi tantangan yang terus berubah perlu melanjutkan gerakan reinterpretasi yang dulu pernah digulirkan.

Iya. Sebetulnya kita memerlukan kerja kolektif, tidak bisa saya sendirian, Pak Masdar sendirian. Kita harus sering ketemu sering bernadwah ilmiah tentang Aswaja. Aswaja itu kita jadikan sebagai *method of thinking*. Aswaja yang sudah mapan itu kita lengkapi dengan mengelaborasinya sehingga cukup untuk menjawab berbagai persoalan baru yang terus bermunculan. Kita tunjukkan pada masyarakat bagaimana Aswaja yang sesungguhnya menuntun

mereka berperilaku dalam hidup yang mengindonesia tetapi tidak melepas nilai-nilai Islam. Karena sebenarnya tuntutan itu besar sekali. Bagaimana konsep ekonomi, budaya, politik, demokrasi yang Aswaja itu. Itu bukan pekerjaan yang ringan dan memerlukan kerja bersama.

Aswaja dalam artian teologis saja masih belum tampak sosok yang jelas bagaimana kemudian mengembangkan merumuskan Aswaja dalam aspek politik, budaya, sosial dan sebagainya?

Saya kira kalau teologis sudah.

Tetapi saya lihat masih terjadi perdebatan yang tidak saling ketemu misalnya ketika Syuriah PBNU mengadakan lokakarya perumusan Aswaja masih belum menemukan kata sepakat atau rumusan yang disepakati bersama.

Tidak apa-apa, yang namanya kata sepakat itu tidak harus hitam putih, kalau tidak hitam pasti putih, tidak. Yang namanya kesepakatan itu kan kompromi, saling menghargai, toh semuanya masih NU. Bagi saya asalkan jernih tidak ada tendensi apa-apa perdebatan yang keras sekalipun saya senang. Perdebatan antar sesama kita, yang tujuannya sama ingin memperkuat NU itu sangat baik sekali. Justru perbedaan itu harus kita pelihara karena akan memperkaya argumentasi, pandangan dan lain-lain. Saya dengan Pak Masdar, dengan Gus Mus, Dus Dur sering tidak ada kata sepakat tapi kita saling menghargai, saling memberi, saling menerima.

Upaya konseptualisasi Aswaja dari hari-ke hari tidak kunjung berkembang, sebabnya apa?

Karena literatur yang kurang dalam

pesantren atau kerena kehati-hatian yang keterlaluhan. Sebenarnya kalau kita lihat mereka paham semua persoalan, paham semua tantangan tetapi karena mereka hati-hati. Memang ada juga yang menolak gerakan itu bukan karena prinsip tetapi karena kekawatiran tertentu, ketakutan akan merugikan kepentingannya. Semua kiai-kiai itu paham tentang gender, demokrasi, tentang isu-isu mutakhir. Buktinya kalau saya berdiskusi dengan mereka, yang mau berfikir juga tahu, faham. Memang susahnyanya, para kiai tidak menguasai debat, belum bisa mengembangkan persoalan, paham tetapi sulit untuk menyampaikan pemahamannya itu. Ada juga yang mengerti kebutuhan tetapi belum mampu mencari jawabannya itu, dan kalau ada orang lain menjawab ia menyetujui asalkan tidak melenceng dari prinsip yang dipeganginya. Saya kira terhadap pikiran-pikiran Pak Masdar para kiai-kiai itu ada beberapa yang berselisih, belum menyetujui. Bukan karena kiai-kiai itu bodoh tapi karena kehati-hatiannya itu. Masalah gender misalnya, kiai itu tahu persis tidak usah diajari mereka juga tahu bahwa al-Qur'an itu tidak membedakan masalah laki-laki dan perempuan dan lain-lainnya. Semangatnya, keadilan gender mereka terima dengan baik. Hanya kiai itu hati-hati jangan sampai menyentuh hal-hal yang tidak mungkin dalam budaya NU seperti perempuan menuntut cerai, perempuan bisa mengajukan ke pengadilan karena suaminya tadi malam memaksa minta hubungan seksual. Dalam soal kesetaraan gender, dalam Islam ada yang namanya *mabadi' ammah*, ketentuan umum yang sarasannya adalah *mas'uliyah*, tanggung jawab, konsekwen-

sinya *hak* dan *bathil*, *kehoir* dan *syar*. Hal ini *enggak* ada bedanya laki-laki dan perempuan. Tentang akhlaq, agama, ilmu, pendidikan, tashawuf, walhasil *enggak* ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu ada *ta'alim diniyyah*, doktrin agama, yang sarasannya *takalif*, kewajiban. *Takalif* ada dua *if'al* dan *la taf'al*, kerjakan dan jangan kerjakan. Contohnya lakukan salat dan jangan zina. Konsekwensinya, yang kita cari adalah *tsawab* dan *iqob*, pahala dan dosa. Dan dalam hal ini, laki-laki dan perempuan ada yang sama ada yang beda, tidak boleh disamakan semua. Yang *takalif* *enggak* bisa ditawar. *Mbok kapakke wae* *enggak* bisa ditawar, *enggak* usah dipikir, didebatkan, dirasionalkan, dicari hikmahnya. Ini agama, ada doktrinnya. Kalau semua dirasionalkan, bukan agama jadinya filsafat.

Orang sering mengatakan bahwa salah satu nilai positif dari Khittah, kembali kepada perjuangan kultural dalam NU adalah terjadinya pergeseran pola pikir, tumbuhnya progresivitas pemikiran kalangan muda NU. Anda melihat perkembangan ini bagaimana nantinya?

Yang namanya perkembangan pola berfikir, inovasi, *tathwirul afkar* itu wajar, itu harus, itu lazim. Tapi saya jamin kalau orang NU -yang memang benar-benar NU- cara berfikirnya tidak akan liberal, ia selalu merujuk pada tulisan-tulisan para ulama. Jadi yang namanya taklid tetap ada tapi kreatif. Orang NU, termasuk generasi mudanya, itu kreatif tapi bagaimanapun juga tidak bisa meninggalkan kitab kuning. Taklid di bolehkan dalam NU asalkan yang kritis dan kreatif, bukan taklid yang tidak boleh bergeser sedikitpun dari ulama

terdahulu. Kita juga senang sebenarnya melihat fenomena teman-teman terutama generasi muda yang kritis, yang kreatif asalkan jangan liberal dan saya percaya tidak akan liberal asalkan masih menghargai kitab kuning, masih menghargai *aqwal* ulama. Siapapun kalau betul-betul NU dan pola pikirnya *tsaqafah nahdliyyah* akan kembali kepada pendapat para ulama walaupun ulama itu hidup seribu tahun yang lalu. Itu efisiensi dalam membangun peradaban. Kita sudah punya hasanah berjilid-jilid itu kita kembangkan, mari kita aktualisasikan dan mari kita cari kontekstualisasinya. Itu efisien sekali ketimbang membangun peradaban dengan membuang seluruh peradaban lama dan mulai dari nol lagi. Kita membangun peradaban yang baru dengan tidak melepas peradaban yang lama. Berangkat dari peradaban lama kita bangun kreatifitas yang baru dengan sifat yang kritis. Dalam NU baik kelompok pesantren yang basicnya *tsaqafah nahdliyyah thok* maupun kelompok yang sudah mampu mencari pendukung bacaan yang bersumber dari luar semuanya tidak meninggalkan hazanah kitab kuning. Makanya mereka tetap bisa ketemu. Mengapa orang-orang semacam Gus Dur diterima oleh generasi muda dan kiai-kiai sepuh karena mereka pada dasarnya tidak meninggalkan kitab kuning. Kiai-kiai seperti kiai Ahmad Siddiq, kiai Ali Maksom, kiai Sahal semuanya tidak meninggalkan kanzanah yang kita miliki, tapi membaca kanzanah itu dengan kritis dan kreatif. Kalau mengabaikan kitab kuning kita ini menjadi masyarakat yang bodoh. Kalau ada jargon kembali pada Qur'an dan Hadist hanya baik pada tingkat idealitasnya. Prakteknya susah.

Dengan langsung merujuk Qur'an-Hadis tidak usah sepintar Syafi'i, bisa separuhnya saja itu sudah luar biasa. Maka bisa jadi kita ini akan terjerumus, terjebak pada kemiskinan intelektual yang sangat parah. Kita punya khazanah, punya kekayaan lalu kita abaikan akan rugi besar. Akan sangat baik jika kanzanah yang kita miliki itu kita kembangkan, kita kaji dengan kaidah-kaidah fiqhiyah sesuai dengan tuntutan zaman. Maka ulama-ulama NU itu gampang sekali mengikuti tantangan zaman dengan tidak meninggalkan kitab kuning karena punya kaidah ushul fiqh. Dalam konteks ini, *taqlid qaulan wamanhajan*, hasil Munas Lampung sudah baik sekali, memang dalam tatanan praktek tidak gampang, karena itu membutuhkan kecerdasan yang tinggi.

Para pengamat mengatakan bahwa penyemaian gagasan-gagasan baru di NU itu datang dari luar, sementara pengembangan dari dalam dari tsaqafah nahdliyyah sendiri belum terjadi. Menurut Anda bagaimana?

Tidak semua, saya kira kalau kita lihat ada dua kelompok. Maaf kalau mencontohkan saya sendiri. Saya ini didikan Timur Tengah yang saya baca dan saya kuasai sekitar *Madzhabib Islamiyah*; Kwawarij, Syi'ah, Jabariah, Qadariah, Mu'tazilah, Mur'ah sampai Ahlussunnah, Tasawuf, Filsafat Islam Ibnu Rusyd, Ibnu Sina dan sebagainya. Sehingga pola pikir saya terbentuk dari pengaruh itu semua, *madzhabib* yang ada di sekitar lingkaran *Madzhabib Islamiyah*. Dan itu bagian dari *tsaqafah* kita sendiri. Dan maaf saya tidak akan keluar dari situ, walaupun bagi beberapa orang atau kiai yang baru mendengar pikiran saya bisa

kaget. Tapi saya tidak akan lepas dari pola pikir islami walaupun saya tidak fanatik dengan satu madzhab. Ada lagi kelompok lain yang karena didikannya, bacaannya dan pergaulannya bukan dari lingkaran *'alamul fikril islami*, dan dia punya prinsip NU, atau apa yang dia peroleh dari pesantren lalu ia mengaktualisasikan ajaran agamanya dengan mengambil konsep Barat. Asal punya prinsip *tawazun, tawasuth, tasamub* tidak apa-apa. Terus terang pola pikir saya sama sekali tidak terpengaruh Barat. Salah kalau orang bilang pola pikir saya Barat. Bacaan saya hanya seputar *'alam fikril islami*. Lahirlah pola pikir seperti saya ini. Walaupun saya dianggap kontroversial saya tetap islami dan masih punya batasan, bingkai islami tidak akan keluar dari spirit itu.

Bagaimana pengalaman Anda dalam mengolah 'alamul fikril islami sehingga ketemu dengan gagasan-gagasan Barat seperti HAM, demokratisasi, pluralisme dan sebagainya yang Anda serukan selama ini?

Itu tidak sulit. Karena pada dasarnya, *'alamul fikril islami* ketemu sekali dengan konsep-konsep itu. Misalnya soal demokrasi, bagaimanapun demokrasi itu sebuah prinsip juga. Hanya secara terminologis, secara ilmiah ini kan baru, bahwa semangat demokrasi, seperti musyawarah, menentang kezaliman, kediktatoran, otoritarianisme itu kan sejak dulu ada dalam *'alamul fikril islami*. Yang namanya demokrasi belum didengar dulu tapi bahwa ulama menentang kezaliman penguasa, membela rakyat itu sudah dilakukan para ulama sejak dulu. Misalkan Hasan Bashri yang menentang dinasti Bani Umayyah walaupun tidak

sampai terbunuh, al-Hallaj dan para sufi dibunuh karena sering mengkritik terhadap para penguasa dalam pembelaan terhadap rakyat dalam sejarah Islam sudah ada sejak dulu walaupun belum ada istilah demokrasi. Memang sejarah dalam Islam penuh dengan penguasa otoriter itu kita akui, dinasti Umayyah, Abasiyah, Usmaniyah semua adalah raja-raja yang otoriter tetapi ada juga beberapa raja yang merakyat. Tapi sikap ulama, tokoh yang menguasai keilmuan Islam pasti bersikap kritis, menjunjung tinggi nilai prinsip-prinsip demokrasi walaupun belum ada istilah demokrasi. Dalam berdemokrasi waktu itu memang belum ada sistem parlementer, kepartaian, pemilihan umum dan sebagainya. Bagaimanapun dibandingkan dengan masyarakat lain yang ada waktu itu di Islam sudah hidup semangat demokrasi. Walaupun itu belum menang dan semua ulama yang memperjuangkan semangat demokrasi mati, minimal disiksa.

Arus deras demokratisasi di NU terjadi setelah NU kembali ke Khittah. Selain faktor gagasan Gus Dur sebagai ketua NU adakah faktor yang lain?

Makna khittah sebenarnya kembali pada *qanun asasi* (aturan dasar) ketika NU baru berdiri yaitu memperjuangkan pendidikan dan da'wah, tidak bicara tentang kekuasaan. Ketika kembali ke Khittah, sedangkan sistem yang paling benar dalam berda'wah dan bermasyarakat itu demokrasi maka sudah barang tentu generasi NU sadar kebutuhannya lalu terpanggil mencari dan memperjuangkan bagaimanakah berdemokrasi itu dan da'wah yang demokratis itu. Inilah faktor yang sangat mendasar.

Praktek nyata tawashhuth, tawazun dan sebagainya dalam konteks perdebatan negara sekuler-negara agama bagaimana?

Menurut saya konsep negara sekuler itu yang memisahkan betul antara *amaliyah duniawiyah* dengan sikap teologi sikap transenden tadi. Misalnya ada orang bisnis yang bilang ini kan masalah ekonomi jangan bicara dosa dan pahalalah. Kita tidak begitu. Orang memakai format *kaya* apa saja dalam ekonomi, politik, demokrasi, apa saja kita bertujuan mencari ridla Allah. Dipersembahkan kepada Allah. Sehingga muncul sikap spiritual *khauf* dan *raja*. Takut tetapi optimis kepada Tuhan. Maka pasti ada rasa takut kepada Allah tetapi tidak terlalu takut seakan-akan Allah maha galak, ya *enggak*. Dan tidak terlalu mengentengkan agama.

Dan ini mempengaruhi juga ketika kita harus mengatur negara ke mana negara ini akan diarahkan sekuler atau ke Islam?

Menurut saya selama orang tidak memotong hubungannya dengan Allah tidak membuang spirit keagamaannya itu tidak sekuler. Apa yang dilakukan Gus Dur kalau itu *lillahi ta'ala enggak* sekuler Gus Dur itu. Pikirannya Pak Masdar, seperti apapun kalau semua itu ingin ia persembahkan untuk Allah *enggak* sekuler. Misalnya ada orang namanya Sandra, Tino, Maman, yang dalam berbisnisnya menggunakan konsep Barat, atau dari mana, dia jujur, tidak merugikan orang, kalau kaya ia zakat, islami sudah. Enggak usah pasang papan usaha Islam, bank Islam, atau koperasi Islam, BPR Islam *enggak* usah. Kalau ada orang bernama Karyo, Kardi dia membela keadilan, demokrasi, membela rakyat *lillahi ta'ala* kurang Islam apa dia? Itu Ahlus-sunnah sudah. Enggak usah bicara negara Islam. Kalau negara itu sudah pemerintahannya adil, hukum ditegakkan, distribusi ekonomi merata, itu sudah islami sekali. Sebatas dipersembahkan kepada Allah itu sudah islami, sudah Ahlussunnah.